

SUBSTANSI PERUBAHAN RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2016 - 2021



BADAN PERENCANAAN PEEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017





Misi 1										
		MD LAMA			PERUBAH	IAN				
NO PERMASALAHAN MASALA	_	AKAR MASALAH	NO		MASALAH		AKAR MASALAH			
1 Kualitas Sumber Kualitas	1.	Masih rendahnya cakupan pendidikan		HAN						
Daya Manusia kelulusan		anak usia dini	1	Kualitas Sumber		1.	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
yang Masih Perlu pendidika		, , , , , ,		,	optimalnya		pendidikan anak usia dini			
Ditingkatkan yang mas		pendidikan		0		2.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
perlu	3.	Masih perlunya peningkatan pendidikan			pelayanan		penyelenggaraan pendidikan dasar			
ditingkatk	an	pembentukan karakter		Ditingkatkan	pendidikan		9 tahun			
	4.	Masih perlunya peningkatan				3.	, , , , , ,			
		kompetensi pendidik dan tenaga					kualitas pelayanan pendidikan			
		Kependidikan					(pendidikan inklusi, Semarang			
	5.	Masih perlunya pengoptimalan kualitas					Knowledge Sharing)			
		pelayanan pendidikan (pendidikan				4.	Masih perlunya peningkatan			
		inklusi, Semarang Knowledge Sharing)					pendidikan pembentukan karakter			
Belum	1.	. , , , ,			Masih	1.	Belum optimalnya budaya perilaku			
seluruh		hidup sehat pada masyarakat			rendahnya		hidup sehat pada masyarakat			
lapisan	2.	Kurangnya kesiapan prasarana dan			kualitas	2.	Kurangnya kesiapan prasarana dan			
masyarak		sarana pelayanan kesehatan pada			kesehatan		sarana pelayanan kesehatan dasar			
mendapa	:	pelaksanaan Jaminan Kesehatan			masyarakat		dan rujukan			
akses ke		Nasional (BPJS)				3.	·			
pelayanar		, ,					Kesehatan Nasional (JKN) bagi			
kesehatar	۱	Operasional Prosedur pelayanan					masyarakat			
yang		kesehatan				4.	Belum optimalnya kompetensi			
bermutu.	4.	Masih perlunya peningkatan kualitas					tenaga medis dan non medis			
		dan kuantitas sarana dan prasarana				5.	Masih tingginya kasus penyakit			
		Kesehatan					menular			
	5.	Kurangnya kualitas pelayanan			Pengembangan	1.	Upaya pelestarian dan pengelolaan			
		melahirkan			kekayaan dan		cagar budaya masih perlu			
	6.	Masih tingginy kasus penyebaran			keragaman		dioptimalkan			
		penyakit meular			budaya masih					
Tingginya	1.	Pertumbuhan ketersediaan lapangan			perlu					
tingkat		kerja formal belum seimbang dengan			ditingkatkan					
pengangg		ketersediaan tenaga kerja			Masih	1.	Kurangnnya wadah dan sarana dan			
an terbuk	a 2.	Masih diperlukan peningkatan minat			rendahnya		prasarana bagi kepemudaan dan			
		kewirausahaan			prestasi dalam		olahraga			
	3.	Peningkatan kualitas dan kompetensi			bidang olahraga					
		seluruh tenaga kerja sesuai dengan			dan					
		kebutuhan pasar tenaga kerja masih			kepemudaan					
		perlu dioptimalkan								

Misi 1

	RPJN	ИD	LAMA	PERUBAHAN RPJMD					
NO PERMASALA -HAN	MASALAH		AKAR MASALAH	NO	PERMASA- LAHAN	MASALAH		AKAR MASALAH	
	Pengembangan kekayaan dan keragaman budaya masih perlu	 3. 4. 2. 	kesehatan (BPJS) dan pendidikan Masih kurangnya pelestarian warisan budaya Upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya masih perlu		LAUAN	tingkat penganggur an Masih belum tuntasnya penanganan perlindunga n sosial	 3. 2. 		
	ditingkatkan Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masih perlu dioptimalkan Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan Koordinasi lintas sektor untuk					melaksanakan pemberdayaan masyarakat masih perlu dioptimalkan	

melaksanakan pemberdayaan

masyarakat masih perlu

dioptimalkan

Misi 2

	/ID				PERUBAH	AN	RPJMD
			NO	PERMASALA-	MASALAH		AKAR MASALAH
' '	1.			HAN			
pengawasan masih perlu od ditingkatkan	 3. 4. 5. 	keuangan dan aset daerah masih perlu dikembangkan lagi Pengelolaan asset masih perlu dioptimalkan lagi Pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah masih perlu dioptimalkan Sistem pengendalian Internal yang dilakukan secara prosedural masih perlu ditingkatkan lagi belum berkualitasnya perenacanaan pembangunan	2	Belum optimalnya penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan		Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP, SP dan SPM Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik Belum optimalnya budaya kerja aparatur Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP belum optimalnya sistem manajemen SDM aparatur
Perlu peningkatan disiplin aparatur	 3. 4. 	keuangan Instansi Pemerintah masih perlu dioptimalkan lagi Integrasi sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai masih belum dimaksimalkan Peningkatan pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional masih perlu dioptimalkan Persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah masih belum merata dari segi jumlah maupun kualitas Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu lebih ditingkatkan				4.5.6.8.	belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan OPD Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan
	HAN MASALAH Daan Upaya pengawasan masih perlu ditingkatkan Perlu peningkatan disiplin	MASALAH Daan Upaya 1. pengawasan masih perlu ditingkatkan 2. 3. Perlu peningkatan disiplin aparatur 2. 3.	1. Sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah masih perlu ditingkatkan 2. Pengelolaan asset masih perlu dioptimalkan lagi 3. Pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah masih perlu dioptimalkan 4. Sistem pengendalian Internal yang dilakukan secara prosedural masih perlu ditingkatkan lagi 5. belum berkualitasnya perenacanaan pembangunan 6. Tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan Instansi Pemerintah masih perlu dioptimalkan lagi Perlu 1. Integrasi sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai masih belum dimaksimalkan 2. Peningkatan pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional masih perlu dioptimalkan 3. Persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah masih belum merata dari segi jumlah maupun kualitas 4. Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu lebih ditingkatkan	HAN MASALAH AKAR MASALAH Jan Upaya pengawasan pengawasan masih perlu ditingkatkan 1. Sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah masih perlu dioptimalkan lagi 2 Jod 2. Pengelolaan asset masih perlu dioptimalkan lagi 3. Pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah masih perlu dioptimalkan 4. Sistem pengendalian Internal yang dilakukan secara prosedural masih perlu ditingkatkan lagi 5. belum berkualitasnya perenacanaan pembangunan 6. Tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan Instansi Pemerintah masih perlu dioptimalkan lagi 1. Integrasi sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai masih belum dimaksimalkan Perlu peningkatan disiplin aparatur 2. Peningkatan pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional masih perlu dioptimalkan 2. Peningkatan pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional masih perlu dioptimalkan 3. Persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah masih belum merata dari segi jumlah maupun kualitas 4. Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu lebih ditingkatkan 5. Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan	MASALAH	MASALAH	MASALAH AKAR MASALAH 1. Sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah masih perlu dioptimalkan lagi 2. Pengelolaan asset masih perlu dioptimalkan lagi 3. Pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah masih perlu dioptimalkan 4. Sistem pengendalian Internal yang dilakukan secara prosedural masih perlu dioptimalkan 5. belum berkualitasnya perenacanaan pembangunan 6. Tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan Instansi Pemerintah masih perlu dioptimalkan lagi 9 Perlu 1. Integrasi sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai masih belum dimaksimalkan 2. Peningkatan pembinaan aparatur jabatan fungsional masih perlu dioptimalkan 2. Peningkatan perangkat Daerah masih belum merata dari segi jumlah maupun kualitas 4. Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu lebih ditingkatkan 5. Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan 4. Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu lebih ditingkatkan 5. Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan 4. Sistem pengelolaan aset daerah masih perlu dioptimalkan 2. Peningkata pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional masih perlu dioptimalkan 3. Persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah masih belum merata dari segi jumlah maupun kualitas 4. Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu lebih ditingkatkan 5. Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan 5. Jumlah, kapabilitas, kapasitas

peningkatan

Misi 2

l	∡anjutan							
	RPJMD LAMA							
NO	PERMASALA- HAN	MASALAH		AKAR MASALAH				
		3) Masih terdapat sarana prasarana pelayanan publik yang belum sesuai standar	2.	Kinerja aparatur pelayan masyarakat masih perlu ditingkatkan Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perlu lebih ditingkatkan				
		4) Masih tingginya jumlah pelanggaran Perda	2.	Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda perlu ditingkatkan Pengawasan dan pendataan terhadap pendidikan ideologi asing, dan organisasi sosial politik masyarakat masih perlu ditingkatkan				
			3.	Pengawasan dan pendataan terhadap pendidikan ideologi asing, dan organisasi sosial politik masyarakat masih perlu ditingkatkan				
			4.	Menurunnya penerapan nilai-nilai kebangsaan/nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, dan kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat				
			5.	Jumlah aparatur pengawas dan penindak pelanggaran Perda masik perlu ditingkatkan				
			6.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				

	PERUBAHAN RPJMD										
NO	PERMASALA-	MASALAH	AKAR MASALAH								
	HAN										
		Masih tingginya gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat	 Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan perundangan Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat 								

Misi 3

	1131 5		D 4 5	7			DEDI IS A	11.6	N DDIMD		
2:0	DEDBACCALC		IVIL	D LAMA	N:0	DEDMASSALS		PERUBAHAN RPJMD			
INO	PERMASALA-	MASALAH		AKAR MASALAH	NO		MASALAH		AKAR MASALAH		
	HAN	D		D 117 1 D 14 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	<u> </u>	HAN		_			
		Belum optimalnya:	1.	Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)	3	Belum	Belum seluruh	1.	Ketersediaan lahan untuk instalasi		
	' '	pemanfaatan tata		dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman		Optimalnya	Rumah Tangga		sanitasi komunal di kawasan pesisir		
	Penyediaan	ruang yang sesuai		dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang		Pembangunan	memiliki		Semarang sangat sulit didapatkan.		
		dengan arahan		dan ijin mendirikan bangunan belum		tata ruang dan	, ,	2.	Upaya peningkatan pelayanan		
	Dasar Dan	rencana tata		berjalan maksimal.		Penyediaan	baik		pengelolaan air minum dan air		
	Penataan	, , ,	2.	Peningkatan kesesuaian pada peruntukan		Infrastruktur			limbah masih perlu dioptimalkan		
	Ruang	(RTRW) maupun		tata ruang masih perlu dioptimalkan		Dasar					
		daya dukung	3.	Fungsi lahan yang belum dioptimalkan			Masih	1.	Masih ada saluran dan gorong-		
		lingkungan					terjadinya		gorong yang belum berfungsi		
							genangan		optimal		
			_				banjir dan rob	2.	Infrastruktur pengendali Rob dan		
		Masih terjadinya	1.	Masih ada saluran dan gorong-gorong					Banjir belum terbangun secara		
		genangan banjir		yang belum berfungsi optimal					menyeluruh		
		dan rob	2.	Infrastruktur pengendali Rob dan Banjir				3.	Saluran drainase belum terintegrasi		
				belum terbangun secara menyeluruh					secara menyeluruh		
			3.	Saluran drainase belum terintegrasi			Belum	1.	Integrasi jaringan jalan dan fasilitas		
				secara menyeluruh			optimalnya		jalan yang masih perlu dioptimalkar		
		4	4.	Saluran drainase belum terintegrasi			aksesibilitas	2.	Kualitas pelayanan angkutan umum		
				secara menyeluruh			dan		masih perlu ditingkatkan		
		ļ	5.	Terjadinya penurunan tanah yang			konektivitas	3.	Pengelolaan sarana dan prasarana		
				semakin tinggi khususnya di daerah			kawasan-		transportasi masih perlu		
				pesisir			kawasan		dioptimalkan		
			6.	Terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim			strategis				
		Belum optimalnya:	1.	Jaringan jalan belum terbangun secara							
		pengembangan ,		menyeluruh							
			2.	Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan							
		transportasi		masih perlu dioptimalkan							
		·	3.	Integrasi jaringan jalan dan fasilitas jalan							
				yang masih perlu dioptimalkan							
			4.	Kualitas pelayanan angkutan umum							
				masih perlu ditingkatkan							
			5.	Pengelolaan sarana dan prasarana							
				transportasi masih perlu dioptimalkan							

Misi 3

		RPJI	ИD	LAMA
NO	PERMASALAHAN	MASALAH		AKAR MASALAH
		Belum seluruh Rumah Tangga memiliki sanitasi yang baik		Ketersediaan lahan untuk instalasi sanitasi komunal di kawasan pesisir Semarang sangat sulit didapatkan. Upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah masih perlu dioptimalkan Upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah masih perlu dioptimalkan
			1. 2. 3. 5. 6.	Pelayanan pengelolaan persampahan masih perlu ditingkatkan Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih perlu dioptimalkan Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih perlu dioptimalkan Penanganan lahan kritis masih perlu ditingkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan masih perlu ditingkatkan Pencemaran udara, air dan tanah perlu dikendalikan Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan.

Misi 4

	Г	RPJMD	
NO		MASALAH	AKAR MASALAH
	HAN		
	Inovasi Dan		Penganekaragaman pangan masih perlu
		ľ, ,	dioptimalkan
	Tambah	distribusi bahan	
	Produksi Pada	pangan perlu	
	Sektor	dioptimalkan	
	Perekonomian		Penyelenggaraan intensifikasi pertanian
	Masih Perlu	r ·	masih perlu dioptimalkan
	Ditingkatkan	1	Pengawasan/pengendalian produksi dan
			distribusi produk ternak masih perlu
			dioptimalkan
			Pengembangan pertanian
			perkotaan/urban farming masih perlu
			dioptimalkan
			Semakin berkurangnya lahan pertanian
			Keterbatasan lahan untuk budidaya
		perikanan perlu	perikanan
		ditingkatkan;	Tingginya alih profesi dari petani
			perikanan keaktivitas perkotaan
		_	Belum optimalnya upaya pembinaan dan
			pengendalian pedagang informal di ruang
		, 00	publik
		jasa-jasa perlu	Belum optimalnya pengendalian pasar
		- - - - - - - - - -	dan ritel modern
			Pasar rakyat belum sepenuhnya tertata
			dengan baik
l			

	PERUBAHAN RPJMD									
NO	PERMASALA-	MASALAH	AKAR MASALAH							
	HAN									
4	Inovasi Dan	Kurang	Belum optimalnya upaya							
	Daya Saing Nilai	berkontribusin	pengembangan dan pengelolaan							
	Tambah	ya sektor-	objek dan daya tarik wisata							
	Produksi Pada	sektor lainnya								
	Sektor	dalam								
	Perekonomian	perekonomian								
	Masih Perlu	daerah								
	Ditingkatkan	Kontribusi	Belum optimalnya pengendalian							
		kategori-	pasar dan ritel modern							
		kategori pada	Akses permodalan dan pasar							
		sektor	Industri Kecil Menengah (IKM)							
		perdagangan	masih terbatas							
		dan jasa-jasa	Belum optimalnya hubungan							
		perlu	kerjasama usaha antara IKM							
		dioptimalkan	dengan industri besar							

Misi 4

		RPJMD	LAMA
NO	PERMASALAHAN	MASALAH	AKAR MASALAH
		Produk-produk unggulan daerah belum dikembangkan dengan maksimal	Belum optimalnya pengembangan industri yang berwawasan lingkungan Pola kemitraan antara UMKM dengan usaha besar belum optimal. Akses permodalan dan pasar Industri Kecil Menengah (IKM) masih terbatas; Belum optimalnya hubungan kerjasama usaha antara IKM dengan industri besar Industri kreatif masih perlu dikembangkan
		Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN masih belum maksimal	Pelayanan dan regulasi penanaman modal masih perlu ditingkatkan Daya saing daerah dalam menarik investasi masih perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata	Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan



Misi 1

			RPJMD LAMA	4		
NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Indikator	OPD
		Tujuan		Sasaran	OPD	
1	Meningkatk		Meningkatnya	Indeks		
	an kualitas		derajat	Pembangunan		
	Sumber		kesehatan	Manusia (IPM)		
	Daya		masyarakat	Angka Harapan		
	Manusia			Hidup (AHH)		
				Angka		
				Kematian Bayi		
				(AKB)		
				Angka		
				Kematian		
				Balita (AKBa)		
				Persentase Gizi		
				Buruk		
				Incident Rate		
			(IR) Demam			
				Berdarah		
				Dengue (DBD)		
			Meningkatnya	Rata-rata Lama		
			kualitas	Sekolah (RLS)		
			pendidikan	Sertolari (RES)		
			masyarakat	Harapan Lama		
				Sekolah (HLS)		
			Meningkatnya	Tingkat		
			kualitas daya	Partisipasi		
			saing tenaga	Angkatan Kerja		
			kerja	, ingitatan iterja		
				Tingkat		
				Pengangguran		
				Terbuka		
			Meningkatnya	Angka		
			kesejahteraan	Kemiskinan		
			masyarakat	Remiskilan		
			masyarakat			

			PERUBAHAN	I RPJMD		
NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Indikator OPD	OPD
		Tujuan		Sasaran		
1	Meningkatkan	IPM	Meningkat	IPM		
	Sumber Daya		nya kualitas			
	Manusia yang		pendidikan			
	berkualitas		dan			
	dan		Kesehatan			
	berbudaya		masyarakat			
				_	Angka	Dinas
				1	, ,	pendidikan
					(AM) dari	
					SD/MI ke	
					SMP/MTs	
						Dinas
				Lama Sekolah	,	pendidikan
					(AM) dari	
					SMP/MTs ke	
					SMA/SMK/MA	
					1	Dinas
					0	pendidikan
					SMP	
				_	0	Dinas
				harapan hidup		Kesehatan
					(AKB) per 1000	
					kelahiran hidup	
						Dinas
					Sakit per 1.000	Kesehatan
					penduduk	
					(dicek lagi)	

Misi 1

			RPJMD LAMA	1		
NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator OPD	OPD
		·	yang berperspektif gender dan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaa n Gender		
	Meningkat kan nilai- nilai warisan budaya masyaraka t		ľ	budaya dan tradisi yang		

			PERUBAHAN	I RPIMD		
NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Indikator OPD	OPD
		Tujuan		Sasaran		
		Indeks	Meningkat	Indeks		
		pembanguna	nya	pembangu-		
		n	warisan	nan		
		kebudayaan	budaya	kebudayaan		
		•	masyara-	,		
			kat			
				persentase	Jumlah	Dinas
				pelestarian	penyelenggara	Kebudayaa
				sejarah dan	an festival seni	n dan
				warisan	dan budaya	Pariwisata
				budaya		
				Tingkat	Persentase	Dinas
				pengembang	organisasi	Kepemuda
				an sdm dan	pemuda yang	an dan
				pranata	aktif	Olahraga
				budaya		
	Meningkatkan	Tingkat	Meningkat	_	jumlah	Dinas
	Daya Saing	Penganggura	nya	Penganggu-	pengangguran	Tenaga
	Masyarakat	n Terbuka	kualitas	ran Terbuka		Kerja
			daya saing			
			tenaga			
			kerja			
				Tingkat	penyelesaian	Dinas
				Partisipasi	perselisihan	Tenaga
				Angkatan	hubungan	Kerja
				Kerja	industrial.	
				Persentase	Persentase	Dinas
					kenaikan Upah	_
				Tenaga Kerja		Kerja
				yang	Kabupaten/	
				Kompeten	Kota (UMK	
				dan		
				Berkualifikasi		

Misi 1 Lanjutan...

			PERUBAHA	N RPJMD		
NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator OPD	OPD
					Persentase pelayanan pengawasan ketenagakerjaan Jumlah tenaga kerja perempuan dan anak yang dilindungi	Dinas Tenaga Kerja
		Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Prosentase (%) PMKS yang mendapat bantuan dan Perlindungan sosia	Dinas Sosial
				Persentase penduduk miskin	Prosentase (%) masyarakat terlantar yang memanfaatkan LBK dan PMKS Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Dinas Sosial
					Cakupan penduduk miskin yg mendpt pelatihan ketenagakerjaan (alternatif)	Dinas Sosial

Misi 1

			PERUBAI	HAN RPJMD		
NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator OPD	OPD
		Tingkat partisipasi masyarakat	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat		
				IPG	Rasio KDRT	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindunga n Anak
					Jumlah Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindunga n Anak
					angka kelahiran yang ideal / TFR =2,0	

Misi 1

			PERUBAHAN	I RPJMD		
NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Indikator OPD	OPD
		Tujuan		Sasaran		
					Persentase	Dinas
					penurunan	Pemberday
					tindak	aan
					kekerasan	Perempuan
					dalam rumah	dan
					tangga (korban	Perlindunga
					perempuan	n Anak
					maupun anak)	
					Jumlah SDM	
					yang dilatih	
					dalam bidang	
					pengembangan	
					ekonomi	

Misi 2

			RPJMD LAMA			
NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator OPD	OPD
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK		
	c.aya		kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan Sakip)		
			integritas aparatur	Predikat Kinerja Penyelenggar aan Pemerintah Daerah		
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		pelayanan prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		
	Mewujudkan Kota Semarang yang tentram, tertib dan nyaman			Angka Kriminalitas		

			PERU	BAHAN RPJN	1D	
NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Indikator OPD	OPD
		Tujuan		Sasaran		
2	Mewujudk	Indeks	Terwujudnya	Indeks		
	an tata	Kepuasan	birokrasi yang	Kepuasan		
	kelola	Masyarakat	melayani	Masyarakat		
	pemerinta					
	han yang					
	baik dan					
	melayani					
		Indeks		Indeks	Tingkat leveling maturitas	Inspektora
		Reformasi		Reformasi	Sistem Pengendalian	t
		Birokrasi		Birokrasi	Intern Pemerintah (SPIP)	
					(6 sub unsur)	
		Angka			Tingkat leveling kapabilitas	
		Kriminalitas			Aparat Pengawas Intern	
					Pemerintah (APIP)	
					Persentase aparatur yang	Badan
					meningkat kompetensinya	
						an,
						Pendidikar
						dan
						Pelatihan
				Opini BPK	•	Badan
					1 .	Pendapata
					Pemerintah Daerah	n Daerah
					Persentase kenaikan	
					Pendapatan Asli Daerah (
					PAD)	

Misi 2

	PERUBAHAN RPJMD									
NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator OPD	OPD				
				Akuntabi litas Kinerja	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK,Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota	Inspektora t				
					Tingkat Pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi yang terintegrasi	Diskominf o				
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP /LAKIP)	Setda				
				pencapaian	Persentase Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah				
				Kinerja Penyelenggara an Pemerintah	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ ATA /AMA, LKJiP, LPPD, ILPPD) yang baik, benar dan tepat waktu					

Misi 2

			PERU	JBAHAN RPJMD)	
NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Indikator OPD	OPD
		Tujuan		Sasaran		
			Meningkatny	Angka		
			a kualitas	Kriminalitas		
			pelayanan			
			ketentraman			
			dan			
			ketertiban			
			masyarakat			
				Persentase	Cakupan kawasan tertib	Badan
				penurunan		Kesatuan
				gangguan		Bangsa
				ketertiban		dan
				dan		Politik
				ketentraman		
				masyarakat		

Misi 3

			RPJMD LAMA			
NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Indikator	OPD
		Tujuan		Sasaran	OPD	
6	Mewujudkan		Meningkatnya	Persentase		
	tata ruang		keterpaduan	kesesuaian		
	yang terpadu		rencana tata	pemanfaatan		
	dan		ruang	ruang dengan		
	berkelanjutan			perencanaan		
				Tata Ruang		
				(simpangan)		
7	Mewujudkan		Menurunnya	Prosentase		
	sistem		luas genangan	luas genangan		
	pengelolaan		banjir dan rob	banjir dan rob		
	Drainase Kota					
	Semarang					
	yang					
	terintegrasi					
8	Mewujudkan		Menurunnya	Jumlah simpul		
	sistem		kemacetan	kemacetan		
	transportasi		jalan			
	Kota					
	Semarang					
	yang					
	terintegrasi					
	dan					
	berkelanjutan					

			PERUBAHAN R	PJMD		
NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator OPD	OPD
	Mewujudkan Pembangunan Kota yang Produktif & Berkelanjutan	Persentase kawasan banjir dan rob	Terwujudnya Tata Ruang yang berdaya guna	Persentase kawasan banjir dan rob		Dinas
				pelaksanaan program Tata Ruang	dok. Perenc tata ruang yg tepat guna	Penataan Ruang
						Dinas Penataan Ruang
			Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota	Luas genangan banjir dan rob	Lama Genangan banjir	Dinas Pekerjaan Umum
				Kendaraan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum
					Jumlah penumpang angkutan umum	Dinas Perhubung

Misi 3

		,				
			RPJMD LAMA			
NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Indikator	OPD
		Tujuan		Sasaran	OPD	
9	Meningkatkan		Terwujudnya	Persentase ru		
	pelayanan		sarana dan	mah tangga		
	sarana dan		prasarana	pengguna		
	prasarana		dasar	air minum /		
	dasar		perkotaan	jumlah seluruh		
	perkotaan		yang	rumah tangga		
			berkualitas	x 100%		
				Persentase ru		
				mah tangga		
				ber sanitasi		
				Luas lingkunga		
				n		
				permukiman k		
				umuh		
10	Meningkatkan		Pengendalian	Indeks Kualitas		
	kualitas		pencemaran	Lingkungan		
	lingkungan		dan perusakan	Hidup (IKLH)		
	hidup		lingkungan			
	perkotaan		hidup			

			PERUBAHAN F	RPJMD		
NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Indikator	OPD
		Tujuan		Sasaran	OPD	
					Jumlah	Dinas
					bangunan	Pekerjaan
					0 -	Umum
					air	
			Tewujudnya	Indeks Kualitas		Dinas
			lingkungan	0 0	kualitas air	Lingkungan
			hidup yang	Hidup (IKLH)		Hidup
			berkualitas			
					Indeks	Dinas
					kualitas	Lingkungan
					udara	Hidup
			Terwujudnya	Luas kawasan	Rasio	Dinas
			sarana dan	kumuh	permukima	Perumahan
			prasarana		n layak huni	dan Kawasan
			dasar			Permukiman
			perkotaan			
			yang			
			berkualitas			
					Luas RTH	Dinas
						Perumahan
						dan Kawasan
						Permukiman
					Persentase	Dinas
					cakupan	Perumahan
					layanan PSU	dan Kawasan
						Permukiman
					Cakupan	Dinas
					pelayanan	Pemadam
					bencana	Kebakaran
					kebakaran	

Misi 3

	PERUBAHAN RPJMD											
NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Indikator	OPD						
		Tujuan		Sasaran	OPD							
					Tingkat	Dinas						
					waktu	Pemadam						
					tanggap	Kebakaran						
					(response							
					time rate)							
					Jumlah	Badan						
					kerugian	Penanggulan						
					bencana	gan Bencana						
						Daerah						

Misi 4

			RPJMD LAN	ЛА									
NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Indikator	OPD	NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Indikator OPD	OPD
		Tujuan		Sasaran	OPD		<u> </u>		Tujuan		Sasaran		
11	Menjamin		Meningkatnya					Meningkatkan	Laju	Meningkatnya	-	Prosentase	Badan
	ketahan			pangan				daya saing		l'		serapan anggaran	
	pangan		kuantitas	penduduk				perekonomian	han .	ekonomi	Ekonomi		Daerah dan
	bagi		ketersediaan					daerah	Ekonomi	berdaya saing			Badan
	penduduk		pangan										Pengelolaan Keuangan dan
			Meningkatnya										Aset Daerah
			r ·	rumah tangga									Aset Daeran
			petani	petani									
			Meningkatnya						Nilai	Meningkatnya	Nilai Investasi		
			kesejahteraan						Investasi	iklim investasi			
			'	per kapita						kota			
			pelaku usaha	nelayan					Kontribusi		Persentase		DPMPTSP
			perikanan						kategori		peningkatan nila	disederhanakan	
12	Meningkatk		Meningkatnya						perdagang an dan jasa		investasi	disedernanakan	
	an sektor		sektor	kategori-					terhadap	7			
	perdaganga		, ,	kategori					PDRB				
	n dan jasa		dan jasa	perdagangan 									
			unggulan	dan jasa-jasa					l/ a ra kuri la a i	NA in also trace	Kantuihai		
				terhadap PDRB						Meningkatnya nilai	kategori		
			-						_		perdagangan		
				Laju Pertumbuhan					Pengolaha		dan jasa		
				Ekonomi					n thd	unggulan	terhadap PDRB		
12	Mendorong		Meningkatnya						PDRB		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
13	pengemban		produk-	kategori							PDRB sektor	Prosentase	Dinas
	gan		ļ*	sektor Industri							perdagangan	peningkatan	Perdagangan
	investasi			Pengolahan							peraagangan	Perdagangan	. c. aagarigari
	dan		daerah	terhadap								besar dan eceran	
	ekonomi		dacian	PDRB							Nilai Ekspor	Nilai ekspor non	Dinas
	lokal		Meningkatnya									migas	Perdagangan
	berdaya		daya tarik	kunjungan								Jumlah kunjungan	
	saing global		wisata (DTW)									wisata	Kebudayaan
			Meningkatnya										Dan
			iklim investasi										Pariwisata
			kota					1	1	1	1	1	1
<u> </u>	l			1	l								

Misi 4

			PERUB	AHAN RPJMD		
NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator OPD	OPD
						Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal	l .	p	Dinas Pertanian
					p	Dinas Perikanan
					ketersediaan	Dinas Ketahanan Pangan
			nilai produktivitas	Kontribusi kategori Industri Pengolahan thd PDRB		Dinas Perindustrian
					Produktivitas dan jangkauan pemasaran industri kreatif	Dinas Perindustrian



PERUBAHAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD

	RF	PJMD LAMA	Р	ΕI	RUBAHAN RPJMD
STRATEGI/ PRIORITAS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI/ PRIORITAS		ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	1	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan pelayanan kesehatan miskin	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	1	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan pelayanan kesehatan miskin
	2	Pengendalian penyakit menular.		2	Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular
	3	Peningkatan Penyehatan lingkungan		3	Peningkatan Penyehatan lingkungan
	4	Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga			Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga
kualitas pendidikan semua masyaraka		Peningkatan pelayanan Pendidikan untuk semua masyarakat	Peningkatan mutu dan aksesibilitas pendidikan	1	Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini
	2	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik		2	Optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 9 tahun
				3	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik
				4	Peningkatan pelayanan Pendidikan untuk semua masyarakat
				5	Pengembangan muatan lokal pendidikan karakter
Perluasan kesempatan	1	Peningkatan ketrampilan masyarakat	Perluasan kesempatan	1	Peningkatan ketrampilan masyarakat
kerja	2	Peningkatan jaringan tenaga kerja	kerja	2	Peningkatan jaringan tenaga kerja
Pemberdayaan masyarakat miskin	1	Penurunan jumlah keluarga miskin	Percepatan Pengentasan kemiskinan	1	Pemberdayaan masyarakat miskin
Pemberdayagunaan		Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayagunaan		Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis
peran serta masyarakat		berbasis komunitas dan gender	peran serta masyarakat		komunitas dan gender
dalam berbagai sektor pembangunan			dalam berbagai sektor pembangunan	2	Peningkatan kualitas data base kependudukan

PERUBAHAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD

		RPJMD LAMA		P	ERUBAHAN RPJMD	
STRATEGI/ PRIORITAS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI/ PRIORITAS		ARAH KEBIJAKAN	
Pengemba-ngan budaya	1	Pelestarian Seni, Budaya yang berbasis kearifan	Pengembangan budaya	1	Pelestarian Seni, Budaya yang berbasis kearifan lokal	
lokal		lokal	lokal		Peningkatan prestasi kepemudaan	
Reformasi Birokrasi	1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggara-an pemerintahan daerah	Reformasi birokrasi	1	Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah	
	2	Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah		2	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah	
	3	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		3	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	
	4	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara- an pemerintahan daerah		4	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	
	5 Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggara-an pemerintahan (digitalisasi kinerja)				Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)	
	6	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)				
Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan	n 1 Peningkatan penyelenggara-an pelayanan publik yang lebih baik;		Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan	1	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	
publik			publik		Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (digitalisasi kinerja)	
Peningkatan peran serta masyarakat dalam	1	Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam	1	Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan	
menjaga ketertiban dan kenyamanan	2	Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat	menjaga ketertiban dan kenyamanan	2	Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat	
Pembenahan penataan kota yang berwawasan	1	Pembenahan izin pemanfaatan ruang dan bangunan sesuai dengan peraturan	Pembenahan penataan kota yang berwawasan	1	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan	
lingkungan	2	Pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan	lingkungan	2	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	
	3	Peningkatan kualitas layanan tranportasi umum		3	Pembenahan izin pemanfaatan ruang dan bangunan sesuai dengan peraturan	
	4	Peningkatan Kualitas infastruktur dasar perkotaan			Pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan	
	5	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1	1		Pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu
				6	Peningkatan kualitas layanan tranportasi umum	

PERUBAHAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD

	RPJMD LAMA	PERUE	BAHAN RPJMD
STRATEGI/ PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI/ PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Produksi Pangan	Peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan	Penguatan dan Pengembangan Sektor Unggulan	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah yang unggul
	Pengembangan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan unggul Peningkatan produksi dan pemasaran perikanan		Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi (kemudahan pemberian bantuan modal
Pengemba-ngan kawasan perdagangan dan jasa	Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa dalam pengembangan ekonomi kota	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa dalam pengembangan ekonomi kota
	Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi		2 Pengoptimalan pemanfaatan sarpras perdagangan dan jasa
	3 Pengoptimalan pemanfaatan sarpras perdagangan dan jasa		3 Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan
			4 Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan
			5 Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan
Penguatan dan Pengemba-ngan Sektor	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah yang unggul	Pengembangan Sektor Pariwisata	1 Peningkatan pengelolaan kepariwisataan
Unggulan	Peningkatan Produktivitas IKM	Penguatan dan	1 Peningkatan Produktivitas IKM
	3 Peningkatan pengelolaan kepariwisataan	Pengembangan Sektor Unggulan	Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi
	4 Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi		



RDIMD Lama

DERLIBAHAN RDIMD

	RPJMD Lama		PERUBAHAN RPJMD							
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah				
-017		PD yang melaksanakan urusan kesehatan	1	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase promosi kesehatan melalui media	Dinas Kesehatan				
	Persentase Puskesmas Branding				Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Dinas Kesehatan				
_	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	2	Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan				
	Persentase Puskesmas yang nilai kinerjanya > 8687				Persentase Puskesmas Branding	Dinas Kesehatan				
peningkatan, dan	Persentase puskesmas yang sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	3	Program Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarpras kesehatan dan jaringannya	Persentase puskesmas yang sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014	Dinas Kesehatan				
	Persentase Puskesmas Prespektif Gender				Persentase Puskesmas Prespektif Gender	Dinas Kesehatan				
	Jumlah RSUD Type D		4	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Dinas Kesehatan				
peningkatan sarana dan prasarana rumah	Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang	RSUD			Persentase Puskesmas yang nilai kinerjanya > 8687	Dinas Kesehatan				
	•	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	5	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang	Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Kota Semarang				
	(success rate)		6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center	Dinas Kesehatan				
	Persentase ODHA yang aktif minum ARV				Persentase Gizi Buruk	Dinas Kesehatan				

		RPJMD Lama			PERU	BAHAN RPJMD	
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah
	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	kesehatan melalui media r k	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	7	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu Maternal	Dinas Kesehatan
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)				Angka Kematian Bayi (AKB)	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	8	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah Penemuan & penanganan penderita TB BTA + (%)	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		PD yang melaksanakan urusan kesehatan			Persentase ODHA yang aktif minum ARV	Dinas Kesehatan
9	Program Pendidikan Anak Usia Dini		PD yang melaksanakan urusan pendidikan	9	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD 3-6 tahun	Dinas Pendidikan
		Jumlah Lembaga PAUD Holistik				Jumlah Lembaga PAUD Holistik	Dinas Pendidikan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD berakreditasi Minimal B		10	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase kelulusan SD/MI dan SMP/MTS	Dinas Pendidikan
		Persentase SMP berakreditasi Minimal B				APM SD/MI	Dinas Pendidikan
		Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa prestasi/Miskin				APK SD/MI	Dinas Pendidikan
		Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa prestasi/Miskin				APM SMP/MTs	Dinas Pendidikan
		Persentase SD INKLUSI				APK SMP/MTs	Dinas Pendidikan
		Persentase SMP INKLUSI				Angka putus sekolah SD/MI	Dinas Pendidikan

D Lama			PER	UBAHAN RPJMD	
ATOR KINERJA ROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah
I	D yang melaksanakan rusan pendidikan			Angka putus sekolah SMP/MTs	Dinas Pendidikan
e SMK tasi minimal B	·			Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Dinas Pendidikan
wa SMA/K beasiswa niskin				Rasio APM P/L SD/MI	Dinas Pendidikan
e SMA INKLUSI e SMK INKLUSI				Rasio APM P/L SMP/MTs Persentase SD berakreditas Minimal B	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
				Persentase SMP berakreditasi Minimal B	Dinas Pendidikan
	D yang melaksanakan rusan pendidikan			Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa prestasi/Miskin	Dinas Pendidikan
Yang berusia > melek huruf (tidak ra)				Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa prestasi/Miskin	Dinas Pendidikan
e Kelembagaan iatan Belajar at (PKBM) asi A				Persentase SD INKLUSI	Dinas Pendidikan
e Kelembagaan n Pelatihan				Persentase SMP INKLUSI	Dinas Pendidikan
us sekolah Ds	st			Jenjang SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan Dst
	kolan D	Kolan Dst	KOIAN DSt	kolan Dst	kolan Dst Jenjang SMA/SMK/MA

		RPJMD Lama		PERUBAHAN RPJMD						
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah			
13	Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	PD yang melaksanakan urusan pendidikan	11	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan			
		Jenjang SD/MI				APK SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan			
		Jenjang SMP/MTs				Angka putus sekolah SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan			
		Jenjang SMA/SMK/MA				Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan			
14	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	APM SD/MI	PD yang melaksanakan urusan pendidikan			Rasio APM P/L SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan			
		APK SD/MI								
		Angka putus sekolah SD/MI		12	Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Dinas Pendidikan			
		APM SMP/MTs				Jenjang SD/MI	Dinas Pendidikan			
		APK SMP/MTs				Jenjang SMP/MTs	Dinas Pendidikan			
		Angka putus sekolah SMP/MTs	Dst			- 1. 0 - /- /	Dinas Pendidikan Dst			

		RPJMD Lama		PERUBAHAN RPJMD						
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah			
		APM SMA/SMK/MA		13	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase SMA berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan			
		APK SMA/SMK/MA				Persentase SMK berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan			
		Angka putus sekolah SMA/SMK/MA				Jumlah siswa SMA/K penerima beasiswa prestasi/ miskin	Dinas Pendidikan			
		Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA				_ t	Dinas Pendidikan			
		Rasio APM P/L SMA/SMK/MA				Persentase SMK INKLUSI	Dinas Pendidikan			
				14	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Kelurahan VOKASI	Dinas Pendidikan			
						Penduduk Yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Dinas Pendidikan			
						Persentase Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi A	Dinas Pendidikan			
							Dinas Pendidikan			
				15	Program pengembangan budaya baca	Jumlah peminjam buku	Dinas Arsip dan Perpustakaan			
15		Persentase tenaga kerja terampil	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari kerja yang di tempatkan	Dinas Tenaga Kerja			
		Persentase tenaga kerja kompeten				Persentase Pencaker ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja			
		Pengadaan Sarpras Balai Latihan Kerja		17	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terampil Dst	Dinas Tenaga Kerja			

RPJMD Lama

PERUBAHAN RPJMD

	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah
16	Kesempatan Kerja	Persentase Pencari kerja yang di tempatkan (= Jml pencaker ditempat-kan/ Jml pencaker mendaftar x 100 %)	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja			Persentase tenaga kerja kompeten	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Pencaker ditempatkan				Jumlah Sarpras Balai Latihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
17	Program Pemberdayaan	· ·	PD yang melaksanakan urusan sosial		Program Pemberdayaan	Cakupan PMKS yang ditangani	Dinas Sosial
18	Program Pemberdayaan	Persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan				Prosentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
19	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan		Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase (%)	Dinas Sosial
		cakupan masyarakat miskin yang dijamin BPJS			Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan	
						cakupan masyarakat miskin yang dijamin BPJS	Dinas Sosial
20	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Persentase keberlanjutan program Pamsimas	PD yang melaksanakan urusan pemberdaya-an masyarakat dan desa		•		Kecamatan dan sekda
21	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan program pengarusutamaan gender			Perlindungan Perempuan	pengaduan Perlindungan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		RPJMD Lama		PERUBAHAN RPJMD				
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah	
22	,	Persentase hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan			Program Pemberdayaan lembaga ekonomi pembangunar kelurahan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	dimanfaatkan Jumlah organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan	
				26	Program Keluarga Berencana	ramah/layak anak Cakupan peserta KB aktif	Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Keluarga Berencana	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan Cakupan peserta KB aktif	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
23	Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya	Persentase pelestarian budaya lokal	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan	29	Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya	Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
24		Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan			Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah karangtaruna yang aktif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan	
				32	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah event olahraga tk.kecamatan dan kota	dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
25	Sistem Pengawasan Internal dan	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi, Inspektorat kota Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti atas rekomendasi dari BPK, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kota	Inspektorat	

		RPJMD Lama			PERUBAHAN RPJMD				
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		
26	daerah	keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	PD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan	34	pengembangan pengelolaan keuangan daerah	pengelolaan anggaran (penurunan silpa)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
27	Program Pengelolaan Aset Daerah	Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang optimal, tertib, dan akuntable sesuai peraturan perundang- undangan		35	Program Pengelolaan Aset Daerah	Tingkat penatausahaan dan kesesuaian nilai aset daerah			
28	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan	36	Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan				Persentase Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan			
29	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKPJ ATA /AMA, LKJiP, LPPD,ILPPD)	Sekretariat daerah	37	Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan OPD (LKPJ ATA /AMA, LKJiP, LPPD,ILPPD) yang baik, benar dan tepat waktu			
		Persentase koordinasi Hubungan Antar Lembaga dalam rangka Otonomi Daerah	Sekretariat daerah						
30	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan	Sekretariat daerah	38	pemanfaatan teknologi	Jumlah aplikasi interaktif dan integrasi untuk mewujudkan e-goverment	Diskominfo		
31	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat	39	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat		
				40	Profesionalisme Tenaga	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			

		RPJMD Lama		PERUBAHAN RPJMD					
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		
	pengembangan Aparatur	struktural sesuai dengan kompetensi. Persentase pegawai yang	Sekretariat daerah		pengembangan Aparatur	struktural dan fungsional sesuai dengan kompetensi Jumlah aparatur yang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
33		mendapatkan hukuman disiplin Survei kepuasan masyarakat	PD yang melaksanakan	42		mendapat remunerasi Persentase OPD yang	Bagian Organisasi		
	Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah	(SKM) pada lembaga	urusan penanaman modal		Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah		Setda		
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang	Sekretariat Daerah			IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat) pada OPD Pemberi Layanan Publik			
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan	Sekretariat Daerah		sumber daya sarana dan	Persentase kelengkapan sarpras pelayanan terpadu satu pintu			
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat Daerah		Peningkatan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Prosentase kelurahan berbasis PATEN			
						& sarpras dasar perkotaan yang representatif (Gedung dan Sarpras Pemerintahan)			
				46		Jumlah organisasi perangkat daerah yang dibina	Bagian Organisasi Setda		
				47	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat keselarasan peraturan perundang- undangan daerah terhadap peraturan perundang- undangan lainnya	Bagian Hukum Setda		

		RPJMD Lama		PERUBAHAN RPJMD				
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah	
					keuangan daerah	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	Badan Pendapatan Daerah	
					Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Tingkat realisasi PAD terhadap potensi riil PAD		
34	Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan penanganan gangguan trantibum	PD yang melaksanakan urusan Ketentraman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat		Penanganan Ketentraman dan	' '	Satpol PP	

		RPJMD Lama		PERUBAHAN RPJMD				
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah	
35	Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada setiap Pemilu	PD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum					
36		masyarakat dalam	PD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum		Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara		
37	Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan	Linmas	PD yang melaksanakan urusan Ketentraman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat		Program Peningkatan Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan	Tingkat kondusifitas terhadap potensi kerawanan sosial politik		
		Konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan	PD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum					
		gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	PD yang melaksanakan urusan Ketentraman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat					
38	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	per satuan bangunan	PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan Ruang		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	Dinas Penataan Ruang	
					Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah kawasan tertangani	Dinas Penataan Ruang	
					Program pengendalian ruang	Rasio bangunan yang ber - IMB	Dinas Penataan Ruang	
39		banjir	PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan Ruang	56	Program Pembangunan saluran drainase / gorong- gorong	Prosentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase.	Dinas Pekerjaan Umum	

	RPJMD Lama		PERUBAHAN RPJMD				
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah	
			57	Program Pengendalian Banjir dan rob	Persentase wilayah bebas banjir	Dinas Pekerjaan Umum	
			58	Program Peningkatan Sarana		Dinas Pekerjaan Umum	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah koridor BRT	PD yang melaksanakan urusan Perhubungan	59	Pemeliharaan Prasarana dan	, , ,	Dinas Perhubungan	
			60	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan		Dinas Perhubungan	
			61	Perhubungan	Tingkat fasilitas transportasi terpantau, Rencana Pembangunan MRT/LRT, Studi transportasi lokal	Dinas Perhubungan	
			62	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Trayek Utama, Cabang dan Ranting, Jumlah Koridor BRT,	Dinas Perhubungan	
			63	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jml halte BRT	Dinas Perhubungan	
Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan	dan sarpras dasar yang	PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan Ruang	64	• ,	Presentase tersedianya air baku	Dinas Pekerjaan Umum	
			65	Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			66	Program Pengelolaan RTH	, ,	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			67		Prosentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang difasilitasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

	RPJMD Lama		PERUBAHAN RPJMD					
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah	PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah		
	PROGRAM				PROGRAM			
			68	Program pembangunan	Kualitas dan Jangkauan Air	Dinas Perumahan dan		
				sarana dan prasarana dasar	Limbah	Kawasan Permukiman		
				perkotaan				
					Kualitas dan Jangkauan Air	Dinas Perumahan dan		
					Minum	Kawasan Permukiman		
					Cakupan pelayanan TPU	Dinas Perumahan dan		
						Kawasan Permukiman		
					Cakupan pelayanan PJU	Dinas Perumahan dan		
						Kawasan Permukiman		
			69	Program Pengelolaan area	Jumlah TPU dalam kondisi	Dinas Perumahan dan		
				pemakaman	baik	Kawasan Permukiman		

		RPJMD Lama		PERUBAHAN RPJMD				
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah	
	Jalan dan Jembatan	jalan dan jembatan dalam	PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan Ruang		Program pembangunan Jalan Dan Jembatan		Dinas Pekerjaan Umum	
					prasarana kebinamargaan	kebutuhan sarana & prasarana kebinamargaan yang layak	Dinas Pekerjaan Umum	
					Informasi/database jalan dan jembatan	ndan informasi jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum	
					pemeliharaan jalan & jembatan	Persentase jalan kondisi rusak ringan yang terehabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum	
	 				Jalan dan jembatan	jembatan	Dinas Pekerjaan Umum	
	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		PD yang melaksanakan urusan Lingkungan nHidup	75			Dinas Lingkungan Hidup	
						Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
				77	Program Pengendalian Polusi	terbangun	Dinas Lingkungan Hidup	
					Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	terhadap pelaksanaan AMDAL	Dinas Lingkungan Hidup	
						persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA	Dinas Lingkungan Hidup	
					Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	Dinas Lingkungan Hidup า	

 			_				
	RPJMD Lama		PERUBAHAN RPJMD				
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah	
			81	Peningkatan kualitas dan jangkauan air limbah	Prosentase jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah	Dinas Lingkungan Hidup	
			82	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang terbangun	Dinas Lingkungan Hidup	
			83	Program Perlindungan dan Konservasi SDA		Dinas Lingkungan Hidup	
			84	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Perda NA RPPLH	Dinas Lingkungan Hidup	
			85	Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Laporan inventarisasi penurunan GRK	Dinas Lingkungan Hidup	
					Jumlah bibit mangrove yang ditanam	Dinas Lingkungan Hidup	
			86	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup	

	RPJMD Lama			PE	RUBAHAN RPJMD	
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah
			87	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup
			88	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran
			89	Pencegahan dini dan penangulangan bencana alam	jumlah kelurahan siaga bencana persentase kelompok siaga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan
					bencana (KSB) jumlah wilayah bencana yang dipetakan menurut jenis bencana	Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					jumlah sarpras pencegahan dini (alat IWS)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Pangan	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun	PD yang melaksanakan urusan Pangan	90	Prog peningkatan produksi pertanian/perkebunan	jumlah Produksi pertanian	Dinas Pertanian
Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan		PD yang melaksanakan urusan Pertanian	91	Program Pengembangan Pertanian Perkotaan	Jumlah luas lahan pertanian	Dinas Pertanian
	Jumlah wilayah pengembangan pertanian perkotaan		92	Program ketahanan Pangan	Jumlah ketersediaan pangan penduduk	Dinas Ketahanan Pangan
pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran	PD yang melaksanakan urusan Pertanian			Peningkatan score pola pangan harapan	Dinas Ketahanan Pangan
 Program Pengembangan	Tingkat produktivitas perikanan tangkap	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan	93	Program Perikanan Terpadu	Jumlah wilayah pegembangan perikanan	Dinas Perikanan
 0 0	Produksi Perikanan Budidaya		94	Program Pengembangan budidaya perikanan	Jumlah wilayah budidaya perikanan	Dinas Perikanan

	RPJMD Lama			PERUBAHAN RPJMD				
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah	PROGRAM INDIKATOR KINERJA Perangk PROGRAM					
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tingkat produktifitas ikan olahan							
			95	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian target serapan anggaran tiap-tiap OPD	BPKAD		
					Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Ratio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	Bapenda		
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan Nilai Ekspor	PD yang melaksanakan urusan Perdagangan	96	Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Dinas Perdagangan		
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	97	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	PD yang melaksanakan urusan Perdagangan	98	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	Dinas Perdagangan		
Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif		99	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah pengawasan alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya)	Dinas Perdagangan		

PERUBAHAN RPJMD

RPJMD Lama

	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Perangkat Daerah
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup
					Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran
				89	Pencegahan dini dan penangulangan bencana alam	jumlah kelurahan siaga bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						persentase kelompok siaga bencana (KSB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						jumlah wilayah bencana yang dipetakan menurut jenis bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						jumlah sarpras pencegahan dini (alat IWS)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
44	Program Ketahanan Pangan	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun	PD yang melaksanakan urusan Pangan	90	Prog peningkatan produksi pertanian/perkebunan	jumlah Produksi pertanian	Dinas Pertanian
45	Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Tingkat produksi pertanian	PD yang melaksanakan urusan Pertanian	91	Program Pengembangan Pertanian Perkotaan	Jumlah luas lahan pertanian	Dinas Pertanian
		Jumlah wilayah pengembangan pertanian perkotaan		92	Program ketahanan Pangan	Jumlah ketersediaan pangan penduduk	Dinas Ketahanan Pangan
46	pertanian/ perkebunan	Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran	PD yang melaksanakan urusan Pertanian			Peningkatan score pola pangan harapan	Dinas Ketahanan Pangan
47	, ,	Tingkat produktivitas perikanan tangkap	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan	93	Program Perikanan Terpadu	Jumlah wilayah pegembangan perikanan	Dinas Perikanan
48	, ,	Produksi Perikanan Budidaya		94	Program Pengembangan budidaya perikanan	Jumlah wilayah budidaya perikanan	Dinas Perikanan
49	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tingkat produktifitas ikan olahan					

		RPJMD Lama		PERUBAHAN RPJMD				
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah	PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah	
62	Program Peningkatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	PROGRAM Peningkatan nilai investasi				PROGRAM Rata-rata jumlah hari penyelesaian perijinan	DPMPTSP	
	neunous mivestus.					Rasio biaya perijinan terhadap nilai investasi	DPMPTSP	
				107	Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		DPMPTSP	
						Jumlah investor	DPMPTSP	

